

Petunjuk Teknis
Pengisian Data
Indeks
Elektronifikasi
Transaksi
Pemerintah Daerah





DAFTAR ISI

BAGIAN	l	1
PENDAH	ULUAN	1
Latar I	Belakang	1
Tujuar	1	2
Ruang	Lingkup	2
BAGIAN	II	3
INDEKS E	LEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	4
Defini	si	4
Manfa	at	4
Cakup	an Indeks ETPD	4
1.	Aspek Implementasi	4
2.	Aspek Realisasi	9
3.	Aspek Lingkungan Strategis	9
BAGIAN	III	12
TATA CA	RA PENGISIAN DATA INDEKS ETPD	13
Pengis	ian Indeks ETPD Melalui SIP2DD	13
1.	Login ke SIP2DD	13
2.	Pengisian Kuesioner	13
3.	Kuesioner Indeks ETPD terdiri dari 7 bagian sebagai berikut:	14
4.	Pengisian Kuesioner memerlukan beberapa persiapan data/dokumensebagai berikut:	14
BAGIAN	IV	15
RENTLIK	DERTANYAAN INDEKS ELEKTRONIEIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	15

BAGIAN I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Adapun peran elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menopang berbagai kegiatan perekonomian antara lain:

- 1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerjasama antara Pemda dengan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk mempermudah penerimaan pendapatan secara nontunai yang bersumber dari pembayaran pajak maupun retribusi.
- 2. Perbaikan tata kelola keuangan Pemda tercermin pada penyediaan proses administrasi lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Seluruhnya merupakan dampak dari program elektronifikasi transaksi keuangan Pemda.
- 3. Peningkatan akses keuangan dapat dilihat dengan semakin merata dan beragamnya ketersediaan kanal dan instrumen pembayaran nontunai di seluruh wilayah, maka pada gilirannya akan meningkatkan peluang kepemilikan rekening dan inklusi keuangan.
- 4. Penguatan kontrol keuangan secara sistematis (tercatat dan terdokumentasi dengan baik) akan memudahkan berbagai pihak dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara *real time*, serta memudahkan berbagai pihak dalam menyusun pelaporan transaksi keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan.

Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2016 yang salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi nontunai di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong percepatan program elektronifikasi transaksi keuangan Pemda. Menindaklanjuti Inpres tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota yang dipertegas dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 Pasal 222 yang berisikan kewajiban Pemda untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia menerbitkan Visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang menetapkan dukungan terhadap digitalisasi daerah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui *Open*

Banking, serta mengembangkan interlink Financial Technology (Fintech) dan Perbankan. Ketiga dukungan tersebut akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terus ditingkatkan dengan adanya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 terkait Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Presiden tersebut mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) ditingkat pusat dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh daerah. Berdasarkan hasil Rapat Komite Kebijakan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Satgas P2DD tanggal 29 September 2020, telah disepakati perlu adanya instrumen yang dapat memonitor implementasi dan dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi strategi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Menindaklanjuti hasil Rapat Pokjanas tersebut, pada tahun 2020 telah digunakan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Indeks ETPD) yang mengukur implementasi ETPD baik untuk transaksi belanja maupun pendapatan dengan berbagai kanal pembayaran serta penggunaan dan integrasi sistem informasi keuangan. Sejalan dengan hal tersebut Indeks ETPD menjadi salah satu modul dalam Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD), yang merupakan portal data dan informasi terkait ETPD yang dilakukan diseluruh daerah.

Tujuan

Tujuan pembuatan Petunjuk Teknis Pengisian Indeks ETPD adalah:

- 1. Memberikan pemahaman terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang meliputi cakupan, transaksi, penggunaan kanal pembayaran dan sistem informasi keuangan dan perbankan.
- 2. Memberikan pedoman dalam pengisian Indeks ETPD yang dilakukan di daerah.
- 3. Meningkatkan keakurasian data pelaporan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang dilaporkan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Komponen dalam ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan Pemda terbagi atas dua kelompok yaitu pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri dari Pemda dan masyarakat, penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank RKUD, Mitra Bank, Agen Bank, *Point Payment*, dan *Fintech*, serta penyedia infrastruktur sistem informasi dan telekomunikasi layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

INDEKS ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH



#
02
ASPEK
REALISASI

#
03
ASPEK
LINGKUNGAN
STRATEGIS





MAJU



DIGITAL



ELEKTRONIFIKASI: BELANJA DAERAH

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.



ELEKTRONIFIKASI: PENDAPATAN DAERAH

Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.



ELEKTRONIFIKASI: PENGGUNAAN KANAL DAN INSTRUMEN

Kanal Pembayaran nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses dan menerima pembayaran yang berasal instrumen dan alat pembayaran nontunai guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha



ELEKTRONIFIKASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka penyeragaman dan integrasi sistem keuangan di seluruh daerah



ELEKTRONIFIKASI: INTEGRASI SISTEM INFORMASI

Integrasi sistem informasi Integrasi dilakukan antara SP2D online dengan CMS, sehingga proses pencairan dana dapat berlangsung secara *end-to-end* mulai dari penerbitan SP2D hingga pencairan dana ke rekening penerima.

BAGIAN II

INDEKS ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Definisi

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Manfaat

Manfaat dari Indeks ETPD adalah:

- 1. Memperoleh gambaran perkembangan tahapan implementasi ETPD di setiap Pemda.
- 2. Memberikan informasi perkembangan dan kendala dalam implementasi ETPD yang dilakukan Pemda untuk suatu periode tertentu.
- 3. Memberikan informasi perbandingan suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya.
- 4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong implementasi ETPD.

Cakupan Indeks ETPD

Indeks ETPD melakukan pengukuran terhadap penyediaan dan penggunaan layanan transaksi pemerintah daerah secara nontunai serta ketersediaan infrastruktur elektronifikasi transaksi pemereintah daerah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Implementasi

Aspek Implementasi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui berbagai kanal pembayaran. Indikator utama yang digunakan dalam aspek implementasi adalah transaksi belanja, transaksi pendapatan dan pemanfaatan kanal pembayaran. Indikator utama yang digunakan dalam aspek implementasi adalah pemanfaatan kanal pembayaran yang tercermin dari transaksi belanja dan pendapatan.

a. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik yang terdiri atas:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Elektronifikasi transaksi belanja daerah merupakan salah satu kegiatan dalam mendorong sistem pemerintaan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penggunaan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan kegiatan penyusunan program kerja, penganggaran, pelaporan hingga realisasi belanja daerah secara nontunai, terutama Belanja Operasi melalui bank RKUD.

Elektronifikasi transaksi belanja daerah meliputi penggunaan berbagai kanal dan instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah

b. Pendapatan Daerah

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), komponen pajak daerah provinsi dan kota/kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Transaksi Pajak Provinsi

No	Pajak Provinsi	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4	Pajak Air Permukaan	
5	Pajak Rokok	

Tabel 2. Komponen Transaksi Pajak Kabupaten/Kota

No	Pajak Kabupaten/Kota

1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7	Pajak Parkir
8	Pajak Air Tanah
9	Pajak Sarang Burung Walet
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pemungutan pajak daerah dapat berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan potensi penerimaanya dan disesuaikan dengan kebijakan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021.

Elektronifikasi transaksi pajak daerah meliputi penggunaan berbagai kanal dan instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah. Elektronifikasi transaksi pajak dilakukan untuk seluruh jenis pajak yang dipungut di daerah dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Penggunaan kanal dan instrumen pembayaran sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan disesuaikan penggunaannya dengan tingkat literasi di daerah agar meningkatkan kecepatan, kenyamanan, keamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, objek retribusi terdiri atas:

a) Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan retribusi terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- **b) Retribusi Jasa Usaha**, yaitu pungutan retribusi terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan retribusi terhadap pelayanan perizinan tertentu ole pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitasi tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elektronifikasi transaksi retribusi dilakukan untuk seluruh jenis retribusi yang dipungut di setiap daerah dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Penggunaan kanal dan instrumen pembayaran sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan disesuaikan penggunaannya dengan tingkat literasi di daerah agar meningkatkan kecepatan, kenyamanan, keamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat.

Table 3. Jenis Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi			
Α	Jasa Umum			
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan			
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
	4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
	5. Retribusi Pelayanan Pasar			
	6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
	7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			
	8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta			
	9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			
	10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair			
	11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			
	12. Retribusi Pelayanan Pendidikan			
	13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
	14. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas			
В	Jasa Usaha			
	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
	3. Retribusi Tempat Pelelangan			
	4. Retribusi Terminal			
	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir			
	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa			
	7. Retribusi Rumah Potong Hewan			
	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			
	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			
	10. Retribusi Penyeberangan di Air			
	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			

С	Ret	Retribusi Perizinan Tertentu		
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung			
	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	3. Retribusi Izin Trayek			
	4. Retribusi Izin Usaha Perikanan			
	5.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		

c. Pemanfaatan Kanal dan Instrumen Pembayaran

Pembayaran pajak dan retribusi melibatkan akses ke sumber dana yang dimiliki masyarakat. Akses tersebut dapat berupa alat, media, dan/atau seperangkat prosedur dalam menginisiasi transaksi pembayaran dan/atau menyediakan akses ke sumber dana untuk pembayaran melalui metode atau penggunaan teknologi tertentu, berupa:

- a. Instrumen;
- b. Kanal; dan/atau
- c. Akses ke sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat secara umum meliputi:

- a. Uang elektronik;
- b. Perintah transfer;
- c. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti APMK, seperti Kartu Kredit, Kartu Debet dan Kartu ATM
- d. Cek;
- e. Bllyet Giro; dan
- f. Instrumen perpindahan dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kanal pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung intrumen pembayaran yang digunakan masyarakat meliputi:

- a. Kanal pembayaran dengan menggunakan teknologi Quick Response Code (QR)
- b. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- c. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC)
- d. Kanal pembayaran online menggunakan teknologi berbasis *mobile* atau internet, termasuk *proprietary channel* ¹atau *shared channel* ²oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP)
- e. Kanal pembayaran menggunakan metode atau penggunaan teknologi tertentu lainnya untuk perpindahan dana.

Dalam penyusunan Indeks ETPD, kanal pembayaran dikelompokkan menjadi Kanal Digital dan Kanal Non Digital sebagai berikut:

¹ Proprietary Channel adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri, a..! *SMS/Mobile/Internet Banking*

² Shared Channel adalahkanal pembayaran yang dikembangkan menggunakan saluran pengiriman bersama dan dapat digunakan secara massal, a.l. ATM, EDC dan QR *code*.

- a. Kanal Digital meliputi ATM, EDC, Uang Elektronik *reader*, QRIS, Kanal pembayaran online berbasis internet dan mobile seperti Internet Banking, Mobile Banking dan SMS Banking, dan penggunaan/kerjasama dengan agen bank, *marketplace* atau *ecommerce*.
- b. Kanal Non Digital, yaitu *Teller* Bank untuk menerima pembayaran tunai, cek, bilyet giro dan perintah transfer lainnya.

Penggunaan instrumen dan kanal tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pemerintah daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

2. Aspek Realisasi

Aspek realisasi mengukur kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Aspek realisasi dilakukan dengan melihat capaian nominal jumlah pajak dan retribusi daerah yang dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran yang disediakan. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan melalui Kanal Digital, Kanal Non Digital dan QRIS.

Tabel 6. Pengukuran Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

No.	Penerimaan Daerah		Jenis	Kanal Pembayaran
1	Capaian	Nominal	Kanal Digital	QRIS
	Jumlah Real	isasi Pajak	Kanal Digital diluar QRIS	ATM
	Daerah			EDC
				Mobile/Internet/SMS Banking
				Agen Bank
				UE Reader
				E-Commerce
			Kanal Non Digital	Teller/ Loket Bank
2	Capaian	Nominal	Kanal Digital	QRIS
	Jumlah	Realisasi	Kanal Digital Non QRIS	ATM
	Retribusi Da	erah		EDC
				Mobile/Internet/SMS Banking
				Agen Bank
				UE Reader
				E-Commerce
			Kanal Non Digital	Teller/ Loket Bank

3. Aspek Lingkungan Strategis

Aspek Lingkungan Strategis mengukur kemampuan infrastruktur sistem informasi, telekomunikasi dan *awareness* masyarakat terhadap layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

a. Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis elektronik

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan berbasis elektronik diperlukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah serta perumusan kebijakan keuangan daerah.

Penggunaan sistem informasi keuangan berbasis elektronik masih beragam di setiap pemerintah daerah. Dalam rangka penyeragaman dan integrasi sistem keuangan di seluruh daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan berdasarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemda diwajibkan melakukan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ke dalam SIPD selambatnya 1 (satu) tahun sejak Permendagri ditetapkan. Untuk menjaga kelancaran operasional Pemda sehubungan dengan proses integrasi tersebut, Kemendagri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/235/Keuda tahun 2021 mengizinkan Pemda menggunakan sistem informasi keuangan daerah yang telah dimiliki dan secara bersamaan melakukan dalam SIPD.

d. Penggunaan Cash Management System (CMS)

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah perlu untuk dapat memantau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau rekening pemda operasional lainnya sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak lain secara nontunai.

Bank RKUD didorong untuk dapat menyediakan layanan nontunai sesuai kebutuhan Pemda yang meliputi penyediaan layanan pengelolaan keuangan berbasis internet/web seperti Cash Management System (CMS). CMS merupakan aplikasi Online yang ditujukan bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

Penggunaan CMS memungkinkan Pemda melakukan transaksi keuangan yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor cabang bank, seperti *inquiry* saldo, transfer dan pembayaran.

e. Penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar dari Pemda ke bank RKUD. SP2D *Online* berfungsi untuk mempercepat proses pencairan yang semula dilakukan secara manual dengan banyak tahapan menjadi dikurangi dengan menghubungkan langsung ke bank RKUD melalui teknologi informasi.

f. Integrasi CMS dengan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik

Integrasi SIKD menghubungkan administrasi keuangan Pemda secara *host-to-host* kepada sistem perbankan untuk melakukan transaksi pembayaran. Integrasi dimaksud dilakukan antara SP2D *Online* dengan CMS, sehingga proses pencairan dana dapat berlangsung secara *end-to-end* mulai dari penerbitan SP2D hingga pencairan dana ke rekening penerima.

g. Jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi berperan penting dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Cakupan jaringan telekomunikasi diulkur berdasarkan jumlah kecamatan yang telah memiliki jaringan telekomunikasi dibagi dengan jumlah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Pemda.

Cakupan jaringan komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu:

- Jaringan 2G hanya mengakomodir telepon dan SMS dengan kecepatan 50 Kbps 1 Mbps.
- **Jaringan 3G** dapat mengakomodir penggunaan video *call, live streaming* serta fitur internet lainnya dengan kecepatan 126 Kbps 2 Mbps.
- **Jaringan 4G** dapat mengakomodir penggunaan internet yang lebih berat termasuk HD TV, *video conference, gaming* dan fitur lainnya dengan kecepatan mencapai 100 Mbps

f. Sosialisasi dan Awareness

Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan nontunai yang telah disediakan, perlu adanya peningkatan literasi bagi masyarakat. Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu kegiatan yang didorong untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi dan minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai melalui berbagai kanal pembayaran.

11



PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN INDEKS ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH



Dalam rangka meningkatkan keakurasian dan kualitas asesmen implementasi ETPD, proses bisnis Indeks ETPD diintegrasikan ke dalam portal data SIP2DD (Modul Indeks ETPD).

1

LOGIN

Ketik https://kelola.p2dd. go.id dan masukkan nama pengguna dan password Anda 2

AKSES MODUL IETPD

Pilih Menu 'Modul
Indeks ETPD' dan ketuk
tautan kuesioner
Bit.ly/DataIndeksETPD
pada papan
pengumuman

3

ISI KUESIONER

Pengisian kuesioner dilakukan melalui koordinasi Pemda, KPwDN dan Bank RKUD 4

SUBMIT

Submit kuesioner, konfirmasi pengisian akan dikirimkan melalui email









BAGIAN III TATA CARA PENGISIAN DATA INDEKS ETPD

Berdasarkan hasil Rakor Pokjanas P2DD tanggal 29 September 2020, telah disepakati Indeks ETPD akan digunakan sebagai metode pemetaan dan asesmen implementasi ETPD di seluruh Pemda. Untuk itu keakurasian dalam pengisian data Indeks ETPD perlu ditingkatkan.

Pengisian Indeks ETPD Melalui SIP2DD

Pengisian data Indeks ETPD terhitung periode Desember 2021 dapat dilakukan melalui Modul Indeks ETPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD) dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login ke SIP2DD

- a. Gunakan *browser* untuk mengakses laman *website* SIP2DD dengan alamat https://kelola.p2dd.go.id.
- b. Masukkan *User* dan *Password* Anda untuk dapat mengakses menu dalam SIP2DD. Pemerintah daerah akan menerima email dan *password* SIP2DD yang dikirimkan oleh Satgas P2DD melalui surat atau media yang akan disampaikan kemudian. Dalam media tersebut akan disampaikan One Time password (OTP) yang dapat digunakan untuk log in kedapam SIP2DD.
- c. Laman SIP2DD akan menampilkan Beranda, lalu pilih menu **Pengisian Indeks**, dan pilih Menu **Indeks ETPD.**
- d. Pengisian data Indeks ETPD dapat dilakukan menekan tombol tanda tambah (+) yang terdapat dalam laman Menu Indeks ETPD.
- e. Pengisian kuesioner Indeks ETPD akan disimpan sebagai *draft* dan dapat dilakukan penyuntingan (edit) sebelum penarikan data pada batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

2. Pengisian Kuesioner

Pelaporan dilakukan melalui koordinasi Pemda, KPwDN dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Terdapat beberapa jenis pertanyaan dalam kuesioner data Indeks ETPD sebagai berikut:

- a. Pilihan ganda, yang memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan.
- b. Multiple Tickboxes yang memungkinkan memilih lebih dari satu jawaban.
- c. Jawaban singkat/terbuka: Saudara dapat mengisi jawaban dengan singkat antara lain nama, email, dan nominal transaksi. Terdapat batasan jumlah karakter dalam pertanyaan singkat/terbuka.
- d. Terdapat pertanyaan yang **WAJIB** diisi sebelum mengisi pertanyaan berikutnya. Untuk itu diharapkan semua pertanyaan dapat terisi.
- e. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi pertanyaan Indeks ETPD sekitar 20-30 menit setelah data yang dibutuhkan dapat dilengkapi.

3. Kuesioner Indeks ETPD terdiri dari 7 bagian sebagai berikut:

- a. Bagian A Informasi Umum, yaitu berupa data nominal pagu dan realisasi penerimaan dan belanja daerah selama tahun berjalan.
- b. Bagian B Transaksi Belanja Pemda, yaitu berupa data terkait elektronifikasi transaksi belanja yang telah dilakukan.
- c. Bagian C Transaksi Pendapatan Pemda, yaitu berupa data terkait elektronifikasi transaksi belanja yang telah dilakukan.
- d. Bagian D Kanal Pembayaran, yaitu berupa data penggunaan kanal pembayaran nontunai yang telah digunakan untuk pemungutan pajak dan/atau retribusi.
- e. Bagian E Realisasi Transaksi Keuangan Daerah, yaitu data realisasi penerimaan daerah melalui berbagai kanal pembayaran.
- f. Bagian F Lingkungan Strategis, yaitu berupa data terkait aspek lingkungan strategis penunjang implementasi ETPD di daerah.
- g. Bagian G Kendala dan Rencana Kerja Perluasan ETPD, yaitu informasi terkait kendala dan rencana kerja terkait implementasi ETPD.
- 4. Dalam mengisi data Indeks ETPD diperlukan pengumpulan data dan koordinasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dan bank pengelola RKUD. Data dan informasi yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Data keuangan daerah berupa:

kecamatan.

- Pagu dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup Pajak dan Retribusi.
- Pagu dan realisasi Belanja mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kanal pembayaran.
- Realisasi Belanja Daerah berdasarkan kanal pembayaran.
- b. Data terkait penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang dipungut sesuai peraturan daerah setempat dan kondisi.
- c. Data terkait belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang dilakukan sesuai peraturan daerah setempat.
- d. Informasi terkait layanan nontunai yang disediakan oleh Bank RKUD, seperti sistem informasi keuangan daerah, SP2D Online, CMS, dan integrasi dengan sistem keuangan.
 Informasi terkait keberadaan jaringan telekomunikasi di wilayah Saudara sampai tingkat

BAGIAN IV BENTUK PERTANYAAN INDEKS ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Pertanyaan	Keterangan	Gambar
titas Pelapor		Email *
il	 Diisi dengan alamat email Saudara. Alamat email tercantum akan menjadi tujuan pengiriman konfirmasi pengisian form untuk memeriksa dan/atau mengedit tanggapan. 	Your email address
•		
rkait profil dan p agian Profil pelap	pemerintah daerah Saudara. Por terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan.	
Nama Petugas Pengisi	Diisi dengan nama lengkap Saudara sebagai identitas.	1. Nama Petugas Pengisi * Your answer
Nomor Induk Pegawai	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Saudara.	2. Nomor Induk Pegawai * Your answer
Nomor kontak responden yang dapat dihubungi	 Diisi dengan nomor kontak (telepon/Handphone) Saudara yang dapat dihubungi. Nomor kontak dapat berupa nomor pribadi maupun nomor kantor. 	Nomor kontak responden yang dapat dihubungi * Your answer
an A: Informasi	Umum	
an realisasi pene agian Informasi u pabila belum ter ohon untuk dap engisian dilakuk utuan rupiah ata	rimaan dan belanja daerah selama tahun 2021. umum terdiri dari 16 (enam belas) pertanyaan. dapat transaksi pendapatan/belanja dimaksud, at memasukan angka "0" (nol). an hanya dengan angka tanpa menggunakan u pemisah "," (koma) atau "." (titik).	A. Informasi Umum Pada bagian ini mohon perkenaan Saudara untuk dapat mengisi jawaban yang sesuai terkait nominal transaksi pendapatan dan belanja berdasarkan kanal pembayaran di Pemerintah Daerah Saudara
	il Pelapor ada bagian ini sagian Profil dan pagian Profil pelapemua pertanyaan Nama Petugas Pengisi Nomor Induk Pegawai Nomor kontak responden yang dapat dihubungi an A: Informasi da bagian ini Sagian Informasi upabila belum terpohon untuk dapengisian dilakuk	titas Pelapor il Polisi dengan alamat email Saudara. • Alamat email tercantum akan menjadi tujuan pengiriman konfirmasi pengisian form untuk memeriksa dan/atau mengedit tanggapan. il Pelapor ada bagian ini Saudara diminta untuk melaporkan informasi prkait profil dan pemerintah daerah Saudara. agian Profil pelapor terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan. emua pertanyaan WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan). Nama Petugas Pengisi Diisi dengan nama lengkap Saudara sebagai identitas. Nomor Induk Pegawai Saudara. Nomor biisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Saudara. Nomor kontak (telepon/Handphone) Saudara yang dapat dihubungi. • Nomor kontak dapat berupa nomor

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
1	Total Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tahun 2021	 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan anggaran pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	Total Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tahun 2021 * Short-answer text
2	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tahun 2021	 Total Realisasi PAD merupakan realisasi pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan sepanjang tahun 2021. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	2. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tahun 2021 * Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer
3	Total Target Pajak Daerah (Rp) Tahun 2021	 Target Pajak Daerah merupakan anggaran kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka 	3. Total Target Pajak Daerah (Rp) Tahun 2021 * Short-answer text

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
4	Total Realisasi Pajak Daerah (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Pajak Daerah merupakan realisasi dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	4. Total Realisasi Pajak Daerah (Rp) Tahun 2021 * Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer
5	Total Target Retribusi Daerah (Rp) Tahun 2021	 Target Retribusi Daerah merupakan anggaran pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "O" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	5. Total Target Retribusi Daerah (Rp) Tahun 2021 * Short-answer text
6	Total Realisasi Retribusi Daerah (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Retribusi Daerah merupakan realisasi dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada 	6. Total Realisasi Retribusi Daerah (Rp) Tahun 2021 * Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
		transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). • Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
7	Total Pagu Belanja Daerah (Rp) Tahun 2021	 Pagu Belanja Daerah merupakan anggaran semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data didapat peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	7. Total Pagu Belanja Daerah (Rp) Tahun 2021 Your answer
8	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Belanja Daerah merupakan realisasi dari kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	8. Total Realisasi Belanja Daerah (Rp) Tahun 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
9	Total Pagu Belanja Operasi (Rp) Tahun 2021	 Pagu Belanja Operasi merupakan anggaran dari pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	9. Total Pagu Belanja Operasi (Rp) Tahun 2021 Your answer
10	Total Realisasi Belanja Operasi (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Belanja Operasi merupakan realisasi dari pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	10. Total Realisasi Belanja Operasi (Rp) Tahun 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer
11	Total Pagu Belanja Modal (Rp) Tahun 2021	 Pagu Belanja Modal merupakan anggaran dari pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	11. Total Pagu Belanja Modal (Rp) Tahun 2021 Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
12	Total Realisasi Belanja Modal (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Belanja Modal merupakan realisasi dari pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	12. Total Realisasi Belanja Modal (Rp) Tahun 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer
13	Total Pagu Belanja Tidak Terduga (Rp) Tahun 2021	 Pagu Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran dari pengeluaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	13. Total Pagu Belanja Tidak Terduga (Rp) Tahun 2021 Your answer
14	Total Realisasi Belanja Tidak Terduga (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan realisasi dari pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "O" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka 	14. Total Realisasi Belanja Tidak Terduga (Rp) Tahun 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampal dengan periode pelaporan Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
15	Total Pagu Belanja Transfer (Rp) Tahun 2021	 Pagu Belanja Transfer merupakan anggaran pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keluarga. Data didapat dari peraturan daerah wilayah kerja Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat pagu pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	15. Total Pagu Belanja Transfer (Rp) Tahun 2021 Your answer
16	Total Realisasi Belanja Transfer (Rp) Tahun 2021	 Realisasi Belanja Transfer merupakan realisasi pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keluarga. Data didapat dari hasil koordinasi bersama bank RKUD. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat realisasi pada transaksi dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "O" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	16. Total Realisasi Belanja Transfer (Rp) Tahun 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan periode pelaporan Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar			
 Post El se To Bo Post ja Post at 	elanja di wilayah ektronifikasi ada ecara nontunai n eller/Loket Bank agian Transaksi E ertanyaan berup waban yang pali emilihan dilakuk	udara diminta untuk melaporkan transaksi Saudara yang telah dielektronifikasi. Alah transaksi belanja tersebut telah dilakukan nisalnya pembayaran melalui agen bank, ataupun transfer bank ke rekening penerima. Belanja Pemda terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. na pilihan ganda untuk memilih 1 (satu)	B. Transaksi Be Pada bagian ini mo jawaban yang sesu Pemerintah Daerah	hon perkenaa ai terkait elekt	n Saudara unt	
		n WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan).				
1	Berikut adalah transaksi	Diisi dengan kondisi saat ini terkait elektronifikasi Transaksi Belanja Langsung di Pemerintah Daerah Saudara.	1. Berikut adalah transa dilakukan secara elekt		sung yang telah Tidak	dapat * Tidak Dianggarkan
	belanja langsung	• Transaksi Belanja Langsung (3) terbagi atas:	Belanja Pegawai	0	0	0
	yang telah	- Belanja Pegawai	Belanja Barang D	\circ	\circ	\circ
	dapat dilakukan secara elektronifikas i	 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengisian dilakukan dengan memilih "Ya" jika transaksi tersebut telah dielektronifikasi atau "Tidak" jika transaksi tersebut belum dielektronifikasi atau "Tidak Dianggarkan" jika transaksi tersebut tidak dilakukan di wilayah 	Belanja Modal	0	0	0

No	Pertanyaan	Keterangan		Gam	bar	
2	Berikut adalah	 Isi dengan kondisi elektronifikasi Transaksi Belanja Tidak Langsung di Pemerintah 	Berikut adalah trans dilakukan secara elekt		ak langsung yan	g telah dapat *
	transaksi	Daerah Saudara.		Ya	Tidak	Tidak Dianggarkan
	belanja tidak langsung	 Transaksi Belanja Tidak Langsung (8) terbagi atas: 	Belanja Pegawai	0	0	\circ
	yang telah	- Belanja Pegawai	Belanja Bunga	0	0	\circ
	dapat dilakukan	Belanja BungaBelanja Subsidi	Belanja Subsidi	\circ	\circ	0
	secara	- Belanja Hibah	Belanja Hibah	0	0	\circ
	elektronifikas i	Belanja Bantuan SosialBelanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan	0	0	\circ
		- Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bagi Hasil	0	\circ	0
		Belanja Tidak TerdugaPengisian dilakukan hanya dengan	Belanja Bantuan	0	0	0
		memilih "Ya" jika transaksi tersebut telah dielektronifikasi atau "Tidak" jika transaksi tersebut belum dielektronifikasi atau "Tidak Dianggarkan" jika transaksi tersebut tidak dilakukan di wilayah Saudara.	dst			
Per	endapatan di wil agian Transaksi ertanyaan. lihan berupa ajak/retribusi enggunakan kan erikut: QRIS ATM, EDC, In Reader, E-Comi Teller/Loket Ba Tunai Tidak dipungut emda dapat m	nk emilih beberapa opsi yang sesuai dengan	C.Transaksi Pe Pada bagian ini mo jawaban yang sesu: Pemerintah Daerah	hon perkenaan ai terkait elektr	Saudara untul	
Pr Pr	rovinsi. Pemda k rovinsi dan lang	Kab/Kota mengosongkan pertanyaan C.1 Pajak gsung melanjutkan ke pertanyaan C.2 Pajak Seluruh Pemda mengisi pertanyaan C.3				

No	Pertanyaan	Keterangan			Gambar		
• Se	•	n WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan) agar ngai belum dilakukan elektronifikasi.					
1			kan un	Fingkat Provinsi> Berik tuk pajak provinsi * ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank, UE Reader, E- Commerce	kut kanal pe Teller/Loket Bank	aran yang Tidak dipungut	
	pembayaran yang telah digunakan untuk pajak	5 jenis pajak yaitu: - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	provinsi	- Pajak Air Permukaan - Pajak Rokok - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
		 Informasi didapat melalui identifikasi setiap transaksi pajak terkait dengan elektronifikasi dan ketersediaan kanal pembayaran yang dapat digunakan oleh 	Air Permukaan Rokok				
	masyara tersebut dengan I Pilihan b Apabila dilakuka Mohon u QRIS ATM, Bank Comm Tellei Tunai Sedangk	masyarakat untuk pembayaran jenis pajak tersebut. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Saudara dapat berkoordinasi dengan Bank RKUD setempat. • Pilihan berupa multiple tickboxes. • Apabila pemungutan pajak provinsi telah dilakukan secara nontunai dan/atau tunai. Mohon untuk opsi sebagai berikut: - QRIS - ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank, UE Reader, E-Commerce - Teller/Loket Bank - Tunai • Sedangkan, untuk pajak yang tidak pungut, dapat memilih opsi 'Tidak dipungut'.					
2	<khusus Responden Kabupaten/K</khusus 	 Pengisian hanya dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota. Pemda Provinsi dapat memilih opsi 'Tidak dipungut' pada 					

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar					
	ota> Berikut kanal pembayaran yang telah	seluruh komponen pertanyaan ini. Pajak Pemda Tingkat Kota/Kabupaten terbagi atas 11 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel		gunaka	len Kabupaten/Kota> an untuk pajak kota/ka ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank,			Tidak
	digunakan untuk pajak	- Pajak Restoran - Pajak Hiburan	Hotel		UE Reader, E- Commerce	Dalik		dipungut
	kota/kabupat en	- Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan	Restoran					
		- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	Hiburan					
		 Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet 	Reklame Penerangan					
		 Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 	Jalan Mineral					
		Bangunan Informasi didapat melalui identifikasi	Bukan Logam dan Batuan					
		setiap transaksi pajak terkait dengan elektronifikasi dan ketersediaan kanal	Parkir Air Tanah					
		pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pembayaran jenis pajak tersebut. Dalam melakukan identifikasi	Sarang Burung Walet					
		tersebut, Saudara dapat berkoordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pilihan berupa multiple tickboxes. Apabila pemungutan pajak provinsi telah dilakukan secara nontunai dan/atau tunai. Mohon untuk opsi sebagai berikut: QRIS ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank, UE Reader, E-Commerce Teller/Loket Bank Tunai Sedangkan, untuk pajak yang tidak pungut, dapat memilih opsi 'Tidak dipungut'.	dst					

No	Pertanyaan	Keterangan		G	ambar			
3	Kanal pembayaran yang telah digunakan	 Pengisian kanal pembayaran untuk transaksi retribusi daerah Wajib diisi (tidak ada yang dikosongkan) oleh setiap Pemda. Retribusi Pemda sebanyak 32 item terbagi 	3. Kanal pembayaran yang tel		ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank, UE Reader, E- Commerce	Feller/Loket Bank	Tunai	Tidak dipungut
	untuk	atas 3 komponen yaitu :	Pelayanan Kesehatan					
	retribusi	- Retribusi Jasa Umum (Pelayanan	Pelayanan Persampahan / Kebersihan					
		Kesehatan, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, dan sebagainya)	Pelayanan Pemakaman					
		- Retribusi Jasa Usaha (Pemakaian	Parkir di Tepi Jalan Umum					
		Kekayaan Daerah, Pasar	Pelayanan Pasar					
		Grosir/Pertokoan, Terminal dan sebagainya)	Pengujian Kendaraan Bermotor					
		- Retribusi Perizinan Tertentu (Izin	dst					
		Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Perikanan, dan sebagainya)	Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan					
		 Informasi didapat melalui identifikasi setiap transaksi retribusi terkait dengan elektronifikasi dan ketersediaan kanal pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pembayaran jenis pajak tersebut. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Saudara dapat berkoordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pilihan berupa multiple tickboxes. Apabila pemungutan pajak provinsi telah dilakukan secara nontunai dan/atau tunai. Mohon untuk opsi sebagai berikut: QRIS ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, Agen Bank, UE Reader, E-Commerce Teller/Loket Bank Tunai Sedangkan, untuk retribusi yang tidak pungut, dapat memilih opsi 'Tidak dipungut'. 						

No	Pertanyaan	Keterangan	G	Gambar			
 Bagian D: Kanal Pembayaran Pada bagian ini, Saudara diminta untuk melaporkan kanal pembayaran nontunai di wilayah Saudara yang telah digunakan untuk pemungutan pajak atau retribusi. Bagian Kanal Pembayaran terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. Pemilihan dilakukan dengan mengklik tombol "Ya" atau "Tidak" disamping kanal terkait. Semua pertanyaan WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan). 			D. Kanal Pembayaran Pada bagian ini mohon perkena jawaban yang sesuai terkait ka pendapatan Pemerintah Daeral	nal pembayaran elekt			
1	Berikut kanal pembayaran	Diisi dengan kondisi penggunaan kanal pembayaran nontunai di wilayah Pemda	Berikut alat/kanal pembayara untuk pembayaran pajak dan r		ia bagi masyarakat *		
	yang telah	Saudara.		Ya	Tidak		
	tersedia bagi masyarakat	Informasi didapatkan melalui identifikasi ketersediaan kanal pembayaran tersebut	Teller/Loket Bank	0	0		
	untuk	untuk transaksi pajak/retribusi untuk	Agen Bank/Point-of-sales	\circ	\circ		
	pembayaran	digunakan oleh masyarakat. Dalam	ATM	\circ	\circ		
	pajak dan retribusi	melakukan identifikasi Saudara dapat berkoordinasi dengan Bank RKUD	EDC	\circ	\circ		
	recribasi	setempat.	UE Reader	0	\circ		
		Definisi dari setiap kanal pembayaran	Internet/Mobile/SMS Ba	\circ	\circ		
		dimaksud terdapat pada <u>Halaman 8.</u>	QRIS				
		Kanal Pembayaran yang lazim untuk	quo				
		masyarakat terbagi atas 8 kanal yaitu :	E-Commerce/ Marketpla	0	0		
		- Teller/Loket Bank- Agen Bank/Point-of-sales					
		- Agen Bank/Point-oj-sules					
		- EDC					
		- UE Reader					
		- Internet/Mobile/SMS Banking					
		- QRIS					
		- E-Commerce/Marketplace/Toko					
		Online					
		Pengisian dilakukan hanya dengan memilih					
		"Ya" jika kanal tersebut telah tersedia					
		untuk pembayaran pajak/retribusi ätau					
		"Tidak" jika kanal tersebut belum tersedia					
		untuk pembayaran pajak/retribusi.					

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
Bagi	 an E: Realisasi T	 ransaksi Keuangan Daerah	E Basiliani Transaksi Kauangan Daarah
_		udara diminta untuk melaporkan nominal	E. Realisasi Transaksi Keuangan Daerah Pada bagian ini mohon perkenaan Saudara untuk dapat mengisi
	_	ah dari kanal QRIS, Non Digital (<i>Teller</i> /Loket	nominal penerimaan daerah Saudara sepanjang tahun 2021 dari kanal QRIS, Semi Digital & Kanal Digital Non QRIS. Apabila belum terdapat
-		igital Non QRIS (ATM, EDC, Agen Bank	transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol).
	-	MS Banking, UE Reader, dan E-Commerce)	
	elama tahun 202		
• Ba	agian Realisasi T	ransaksi Keuangan Daerah terdiri dari 17 (tujuh	
	elas) pertanyaan		
		erdapat transaksi penerimaan dalam kanal	
		untuk dapat memasukan angka "0" (nol).	
		an hanya dengan angka tanpa menggunakan	
	_	u pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
	•	n WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan).	
1	Nama Bank	Diisi dengan nama Bank Pengelola RKUD di	
	RKUD	Pemerintah Daerah Saudara.	1. Nama Bank RKUD *
		Pemda dapat menunjuk lebih dari satu	
		Bank sebagai Bank RKUD, misalnya Bank	Your answer
		Pembangunan Daerah (BPD) Banten dan	
		Bank Negara Indonesia (BNI)	
		Mohon untuk menuliskan semua nama	
		bank RKUD yang ditunjuk oleh Pemda	
		Saudara dengan menambahkan pemisah	
		"," (koma) pada setiap nama Bank.	
2	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui kanal	
	Daerah Dari	QRIS sepanjang tahun 2021.	2. Total Pajak Daerah Dari Kanal QRIS (Rp) *
	Kanal QRIS	Sumber data dapat diperoleh antara lain	
	(Rp)	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD	Your answer
		setempat.	
		Isian berupa jawaban singkat.	
		Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
3	Total Retribusi Daerah Dari Kanal QRIS (Rp)	 Total realisasi Retribusi Daerah melalui kanal QRIS sepanjang tahun 2021. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	3. Total Retribusi Daerah Dari Kanal QRIS (Rp) * Your answer
4	Total Pajak Daerah Dari Kanal Non Digital (<i>Teller</i> & Loket Bank) (Rp)	 Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal Non Digital (<i>Teller</i> & Loket Bank) tahun 2021. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	4. Total Pajak Daerah Dari Kanal Non Digital (Teller & Loket Bank) (Rp) * Your answer
5	Total Retribusi Daerah Dari Kanal Non Digital (<i>Teller</i> & Loket Bank) (Rp)	 Total realisasi Retribusi Daerah melalui Kanal Non Digital (<i>Teller</i> & Loket Bank) sepanjang tahun 2021. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "O" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	5. Total Retribusi Daerah Dari Kanal Non Digital (Teller & Loket Bank) (Rp) * Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
6	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	6. Total Pajak Daerah Dari Kanal ATM (Rp) *
	Daerah Dari	ATM sepanjang tahun 2021.	,
	Kanal ATM	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	(Rp)	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
		Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
7	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	7. Total Pajak Daerah Dari Kanal EDC (Rp) *
	Daerah Dari	EDC sepanjang tahun 2021.	
	Kanal EDC	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	(Rp)	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
		Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
8	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	8. Total Pajak Daerah Dari Kanal Internet/Mobile/SMS
	Daerah Dari	Internet/Mobile/SMS Banking sepanjang	Banking (Rp) *
	Kanal .	tahun 2021.	Vausanaus
	Internet/	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Mobile/SMS	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	Banking (Rp)	Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
9	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	9. Total Pajak Daerah Dari Kanal Agen Bank (Rp) *
	Daerah Dari	Agen Bank sepanjang tahun 2021.	7. Total Fajak Daeran Dari Nanal Agen Bank (RP)
	Kanal Agen	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Bank (Rp)	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	Total dilottel
	Dank (NP)	Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		monon untuk dapat memasukan angka	

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
10	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	10. Total Pajak Daerah Dari Kanal UE Reader (Rp) *
	Daerah Dari	UE Reader sepanjang tahun 2021.	
	Kanal <i>UE</i>	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Reader (Rp)	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
		Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
11	Total Pajak	Total realisasi Pajak Daerah melalui Kanal	11. Total Pajak Daerah Dari Kanal E-Commerce (Rp) *
	Daerah Dari	E-Commerce sepanjang tahun 2021.	(,,,
	Kanal <i>E</i> -	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Commerce	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	(Rp)	Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
12	Total	Total realisasi Retribusi Daerah melalui	12 Tatal Databasia in Daniel Daniel (Canal Dinital ATM (Da)
	Retribusi	Kanal ATM sepanjang tahun 2021.	12. Total Retribusi Daerah Dari Kanal Digital ATM (Rp) *
	Daerah Dari	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Kanal ATM	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	(Rp)	Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
13	Total	Total realisasi Retribusi Daerah melalui	13. Total Retribusi Daerah Dari Kanal EDC (Rp) *
	Retribusi	Kanal EDC sepanjang tahun 2021.	15. Total Retribusi Daerari Dari Ranai EDC (Rp)
	Daerah Dari	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Kanal EDC	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	(Rp)	• Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
14	Total	Total realisasi Retribusi Daerah melalui	14. Total Retribusi Daerah Dari Kanal
	Retribusi	Kanal Internet/ Mobile/SMS Banking	Internet/Mobile/SMS Banking (Rp) *
	Daerah Dari	sepanjang tahun 2021.	
	Kanal	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Internet/	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	Mobile/SMS	Apabila belum terdapat transaksi	
	Banking (Rp)	penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	
15	Total	Total realisasi Retribusi Daerah melalui	15. Total Retribusi Daerah Dari Kanal Agen Bank (Rp) *
	Retribusi	Kanal Agen Bank sepanjang tahun 2021.	,,,,,,
	Daerah Dari	Sumber data dapat diperoleh antara lain	Your answer
	Kanal Agen	dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD.	
	Bank (Rp)	Apabila belum terdapat transaksi	
		penerimaan dalam kanal dimaksud,	
		mohon untuk dapat memasukan angka	
		"0" (nol).	
		Pengisian dilakukan hanya dengan angka	
		tanpa menggunakan satuan rupiah atau	
		pemisah "," (koma) atau "." (titik).	

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
16	Total Retribusi Daerah Dari Kanal <i>UE</i> <i>Reader</i> (Rp)	 Total realisasi Retribusi Daerah melalui Kanal <i>UE Reader</i> sepanjang tahun 2021. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD. Apabila belum terdapat transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau 	16. Total Retribusi Daerah Dari Kanal UE Reader (Rp) * Your answer
17	Total Retribusi Daerah Dari Kanal <i>E- Commerce</i> (Rp)	 pemisah "," (koma) atau "." (titik). Total realisasi Retribusi Daerah melalui dari Kanal <i>E-Commerce</i> sepanjang tahun 2021. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD. Apabila belum terdapat transaksi penerimaan dalam kanal dimaksud, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Pengisian dilakukan hanya dengan angka tanpa menggunakan satuan rupiah atau pemisah "," (koma) atau "." (titik). 	17. Total Retribusi Daerah Dari Kanal E-Commerce (Rp) * Your answer
• Pa	ngkungan strateg nudara.	n Strategis udara diminta untuk melaporkan aspek gis penunjang implementasi ETPD di daerah n WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan). • Pilih sistem informasi keuangan daerah	F. Lingkungan Strategis Pada bagian ini mohon perkenaan Saudara untuk dapat mengisi jawaban yang sesuai terkait lingkungan strategis penunjang implementasi ETP di daerah Saudara. 1. Sebutkan sistem informasi keuangan daerah
	sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik (Pendapatan/ Penerimaan Daerah) yang saat ini digunakan	berbasis elektronik yang digunakan untuk Pendapatan/Penerimaan Daerah. Sistem informasi keuangan daerah dikelompokan atas beberapa jenis yaitu: - SIMDA - SIMRAL - SIPKD - Belum Menggunakan Sistem - Lainnya (Other)	berbasis elektronik (Pendapatan/Penerimaan Daerah) yang saat ini digunakan * SIMDA SIMRAL SIPKD Belum Menggunakan Sistem Other:

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
2	Sebutkan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik (Belanja Daerah) yang saat ini digunakan	 Pilih sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik yang digunakan Belanja Daerah. Sistem informasi keuangan daerah terbagi atas beberapa jenis yaitu: SIMDA SIMRAL SIPKD Belum Menggunakan Sistem Lainnya (Other) 	2. Sebutkan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik (Belanja Daerah) yang saat ini digunakan * SIMDA SIMRAL SIPKD Belum Menggunakan Sistem Other:
3	Apakah sistem informasi keuangan daerah yang digunakan tersebut telah terintegrasi dengan SIPD?	 Diisi dengan kondisi integrasi sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik dengan SIPD. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Ya" jika telah terintegrasi dengan SIPD atau "Tidak" jika belum terintegrasi dengan SIPD. 	3. Apakah sistem informasi keuangan daerah yang digunakan tersebut telah terintegrasi dengan SIPD? Ya Tidak
4	Apakah Pemda Saudara sudah mengimplem entasikan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring / Online?	 Diisi dengan kondisi implementasi SP2D Online di Pemerintah Daerah. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Sudah" jika telah mengimplementasikan SP2D Online atau "Belum" jika belum mengimplementasikan SP2D Online. 	4. Apakah Pemda Saudara sudah mengimplementasikan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring / online? * Sudah Belum
5	Apakah Pemda Saudara sudah mengimplem entasikan aplikasi Cash Management	 Diisi dengan kondisi implementasi Cash Management System (CMS) Pendapatan/Penerimaan Daerah di Pemerintah Daerah Saudara. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih 	5. Apakah Pemda Saudara sudah mengintegrasikan aplikasi Cash Management System (CMS)? * Sudah Belum

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
	Sistem (CMS)	"Sudah" jika telah mengimplementasikan CMS atau "Belum" jika belum mengimplementasikan CMS.	
6	Apakah Pemda Saudara sudah mengintegras ikan aplikasi Cash Management Sistem (CMS) dengan sistem keuangan Pemda?	 Diisi dengan kondisi integrasi antara sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik (dapat berupa SP2D Online) dengan CMS di Pemerintah Daerah Saudara. Sumber data dapat diperoleh antara lain dari hasil koordinasi dengan Bank RKUD setempat. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Sudah" telah terintegrasi dengan CMS atau "Belum" jika belum terintegrasi dengan CMS 	6. Apakah Pemda Saudara sudah mengintegrasikan aplikasi Cash Management System (CMS) dengan sistem keuangan Pemda? * Sudah Belum
7	Apakah Pemda Saudara sudah memiliki ketersediaan regulasi terkait elektronifikas i transaksi pemerintah daerah?	 Regulasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah setiap regulasi/ketentuan yang diterbitkan oleh Pemda Saudara dalam mendorong perluasan implementasi ETPD di wilayah Pemda Saudara. Diisi dengan ketersediaan regulasi ETPD di Pemda Saudara. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Sudah" jika telah terdapat regulasi ETPD atau "Belum" jika belum terdapat regulasi ETPD. 	7. Apakah Pemda Saudara sudah memiliki ketersediaan regulasi terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah? * Sudah Belum
8	Jika Ya, sebutkan regulasi yang sudah dimiliki	 Diisi dengan regulasi yang telah dimiliki oleh Pemda Saudara. Isian berupa jawaban singkat. Apabila belum terdapat regulasi, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). Jika terdapat lebih dari 1 (satu) regulasi maka dapat menggunakan pemisah "," (koma) pada setiap regulasi. 	8. Jika Ya, sebutkan regulasi yang sudah dimiliki Your answer

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
9	Apakah Pemda Saudara sudah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran nontunai / elektronifikas i pajak dan/atau retribusi pada media massa?	 Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi dan minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai khususnya penggunaan kanal pembayaran dan/atau platform digital (QRIS, ATM, EDC, E-Commerce, dsb). Diisi dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai pembayaran nontunai pada penerimaan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Saudara. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Sudah" jika telah melakukan sosialisasi atau "Belum" jika belum melakukan sosialisasi. 	9. Apakah Pemda Saudara sudah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran nontunai / elektronifikasi pajak dan/atau retribusi pada media massa? * Sudah Belum
10	Apakah Pemda Saudara memiliki Rencana Aksi pengembang an ETPD di daerah pada tahun 2021?	 Rencana Aksi Pengembangan ETPD adalah serangkaian program kerja yang disusun berdasarkan peta jalan TP2DD dalam rangka mendorong perluasan implementasi ETPD terutama elektronifikasi transaksi penerimaan daerah dengan menggunakan kanal pembayaran dan/atau platform digital (QRIS, ATM, EDC, <i>E-Commerce</i>, dsb). Diisi dengan ketersediaan program kerja ETPD di Pemerintah Daerah Saudara Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Sudah" jika telah terdapat program kerja ETPD atau "Belum" jika belum terdapat program kerja ETPD. 	10. Apakah Pemda Saudara memiliki Rencana Aksi pengembangan ETPD di daerah pada tahun 2021? * Sudah Belum
11	Apakah di wilayah Saudara terdapat daerah/keca matan yang belum terlayani oleh jaringan internet (blankspot)?	 Diisi dengan keberadaan wilayah yang belum memiliki layanan jaringan internet di wilayah Pemerintah Daerah Saudara. Informasi didapatkan dari hasil koordinasi bersama Dinas Kominfo setempat. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Ya" jika masih terdapat wilayah blankspot atau "Tidak" jika tidak terdapat wilayah blankspot. 	11. Apakah di wilayah Saudara terdapat daerah/kecamatan yang belum terlayani oleh jaringan internet (blankspot)? * Ya Tidak

No	Pertanyaan	Keterangan			Gam	bar		
12	Jika Ya, sebutkan wilayah blankspot dimaksud	 Diisi dengan nama wilayah yang masih terdapat blankspot. Informasi didapatkan dari hasil koordinasi bersama Dinas Kominfo setempat. Isian berupa jawaban singkat. Apabila tidak terdapat wilayah blankspot, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol). 	12. Jika Ya, Your answe		kan wilay	vah blan	kspot d	imaksud
13	Berikan ceklis persentase Kecamatan /	komunikasi di wilayah saudara pada tingkat Kecamatan. esa di ilayah bersama Dinas Kominfo setempat. • Persentase cakupan jaringan di wilayah Pemda jumlah Kecamatan yang telah memiliki jaringan (2G/3G/4G) dibagi dengan Jumlah total Kecamatan di wilayah	13. Berikan ceklis persentase Kecamatan / Desa di wilayah saudara yang telah tercakup jaringan komunikasi. *					
	Desa di wilayah			1% s.d 25%	26% s.d 50%	51% s.d 75%	76% s.d 100%	Belum Ada
	saudara yang telah		Jaringan 2G	0	0	0	0	0
	tercakup jaringan		Jaringan 3G	0	0	0	0	0
	komunikasi		Jaringan 4G	0	0	0	0	0
14	Berikan ceklis pada instansi yang telah menjalin kerja sama dalam memudahkan pemungutan pajak dan retribusi	 Pilih instansi yang telah menjalin kerja sama dalam memudahkan pemungutan pajak dan retribusi: Perizinan Dukcapil OPD Penghasil Kantor BPN KPP Pratama 	☐ Kantor	a dalam usi * an pil enghasil				
Bagian G: Kendala dan Rencana Kerja Perluasan ETPD Pada bagian ini Saudara diminta melaporkan kendala dan rencana kerja terkait implementasi ETPD dan pengisian formulir tracking ETPD Semua pertanyaan WAJIB diisi (tidak ada yang dikosongkan).			G. Kendala Pada bagian ir kerja terkait in	ni Saudara	diminta me	laporkan ke	endala dan i	rencana

No	Pertanyaan	Keterangan	Gambar
1	Berikan ceklis pada kendala dan/atau permasalaha n dalam pelaksanaan ETPD di daerah Saudara	 Pilih kendala dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan ETPD di daerah Saudara: Komitmen Pemda Kompetensi SDM Pemda Minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai Infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi/internet Infrastruktur/Layanan Perbankan 	1. Berikan ceklis pada kendala dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan ETPD di daerah Saudara Komitmen Pemda Kompetensi SDM Pemda Minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai Infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi/internet Infrastruktur/Layanan Perbankan Other
2	Apakah wilayah Saudara telah membentuk TP2DD	 Diisi dengan kondisi pembentukan TP2DD di wilayah Pemerintah Daerah Saudara Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Ya" jika terbentuk TP2DD atau "Tidak" jika belum terbentuk TP2DD 	2. Apakah wilayah Saudara telah membentuk TP2DD * Ya Tidak
3	Jika Ya, sebutkan landasan hukum pembentuka n TP2DD	 Diisi dengan landasan hukum dalam pembentukan TP2DD di Pemerintah Daerah Saudara Isian berupa jawaban singkat Apabila tidak terdapat landasan hukum pembentukan TP2DD, mohon untuk dapat memasukan angka "0" (nol) 	3. Jika Ya, sebutkan landasan hukum pembentukan TP2DD Your answer
4	Apakah dalam pengisian ini Saudara dibantu oleh Bank RKUD dan KPw Bank Indonesia setempat?	 Diisi dengan kondisi kerja sama pengisian kuesioner Indeks ETPD di wilayah Pemerintah Daerah Saudara. Pengisian dilakukan hanya dengan memilih "Ya" jika telah dilakukan kerja sama atau "Tidak" jika belum dilakukan kerja sama. 	4. Apakah dalam pengisian ini Saudara dibantu oleh Bank RKUD dan KPw Bank Indonesia setempat? Ya Tidak
mela	•	awab seluruh pertanyaan, responden tombol "KIRIM" atau "SUBMIT" untuk	A copy of your responses will be emailed to the address that you provided. Page 2 of 2 Back Submit Clear form

TIM PENYUSUN

Penasihat

Rahmat Hernowo

Penanggung Jawab

Sithowati Sandrarini

Tim Penulis

Duddy Adiyatna

Ni Putu Myari Artha

Primitiva Febrianti

Dara Ayu Prastiwi

Santi Permatasari

Sucha Febrina

Sigit Wahyu Kartiko

Dayu Rusanto

Chorunissa Rifa Juliani

Alfira Chaerunisa